

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta, UII Press .

Alfitra, 2008, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta, FIM Jakarta.

Andi. Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2023, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.

Adjie Habib, 2006, Hukum Notaris Indonesia, Jakarta, Erlangga.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia efektif Hukum Dan Etika, Yogyakarta, UII Press.

Bambang Waluyo, 1992, Sistem pembuktian dalam Peradilan Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arief, 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Barda Nawawi Arief, 2012, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Semarang, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.

Deddy Ismatullah, 2007, Ilmu Negara dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, Bandung, Pustaka setia.

Deni Setyo Bagus Yuherawan, 2014, Dekonstruksi Asas Legalitas Hukum Pidana, Sejarah Asas Legalitas dan gagasan Pembaharuan Filosofis Hukum Pidana, Malang, Setara Press.

Djoko Sumaryanto, 2020, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Prestasi Pustaka.

Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka, Yogyakarta, Yustisia.

Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika, Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada.

Efa Laela Fakhriah, 2017, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata", Bandung Rafika Aditama.

G.H.S Lumban Tobing, 2001, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga.

Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung. Penerbit Mandar Maju.

Habib Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung, Refika Aditama.

Hari Sasangka dan Lily Rosita, 1999, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Wijaya.

Moeljatno, 2000, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta.

Mertokusumo Sudikno, 2006, Hukum Acara perdata Indonesia, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti.

Maskun, 2020, Korelasi Kejahatan Siber Dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional, Makassar, Nas Media Pustaka

Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

R. Subekti, 1995, Hukum Pembuktian, Jakarta, PT. Pradnya Paramita.

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2009, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita.

R.Subekti . R.Tjirosudibio, 1992, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azas-azas Hukum Perjanjian, Bandung, Mandar Maju.

Richardus Eko Indrajit, 2001, *E-Commerce* Kiat dan Strategi Bisnis di Dunia Maya, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

Siswanto Sunarso, 2009, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Suhrawardi K. Lubis, 2006, Etika Profesi Hukum, Jakarta, Sinar Grafika.

Sjahran Basah, 1986, Tiga Tulisan tentang Hukum, Bandung, Penerbit Armico.

Salim HS, 2003, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Sasangka Hari dan Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi, Bandung, Cetakan 1, Mandar Maju.

Subekti, Hukum Pembuktian, 1995, Jakarta, Pradnya Paramita.

Seri Wardah dan Bambang Sutyoso, 2007, Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya Di Indonesia, Yogyakarta, Gama Media.

Suharmoko, 2015, Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus, Jakarta, PT. Kharisma Putra Utama.

Lawrence M. Friedman, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar (terjemahan Wisnu Basuki), Jakarta, Penerbit PT. Tata Nusa.

Ledeng Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan, Jakarta, Sinar Grafik.

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif Teoritis Praktik dan Permasalahannya, Bandung, PT. Alumni.

Irawan Soerodjo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Surabaya, Arkola.

Jimly Asshiddiqie, 2010, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Jakarta, Sinar Grafik.

Juajir Sumardi, 2017, Hukum Perusahaan Transnasional dan Franchise, Makassar, Arus Timur.

Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, 2023, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum, Jakarta, Rajawali Pers.

Jurnal & Karya Ilmiah

Aloina Sembiring Meliala, 2015, Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa, Jurnal Wawasan Yuridika 32. Nomor 1.

Amalia R, Musakkir, Muchtar. S, 2021, Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta, Al-Ishlah Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 24, No.1, Magister Kenotariatan Fakultas hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Bambang Poernomo, 1989, Manfaat Telaah Ilmu Hukum Pidana Dalam Membangun Model Penegakan Hukum Di Indonesia, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Madja, Yogyakarta.

Deni SB Yuherawan, 2012, Kritik Ideologis Terhadap Dasar Kefilsafatan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 12 No. 2 Mei.

Dimas Febrian Syahputra, 2015, Jurnal Hukum Perlindungan Hukum Transaksi E-Commerce, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Dewi Setyowati, Candra Pratama Putra, and Ramdhan Dwi Saputro, 2019, Perlindungan Hukum Pada Tindak Pidana E-Commerce, Perspektif Hukum 18. Nomor 2.

Endang Pristiwati, 2013, Konsekuensi Yang Timbul Dari Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Materiil, Jurnal Hukum dan Pemikiran IAIN Antasari, Vol.13, No.2.

I Dewa Made Suartha, 2015, Pergeseran Asas Legalitas Formal Ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Fakultas Hukum Universitas Udayana.

M.Sanusi Arsyad, Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce, Studi Tentang Permasalahan – Permasalahan Hukum dan Solusinya, Yogyakarta.

- Hasanuddin Rahman, 2003, Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2001, Kontrak Bisnis Internasional, Surabaya, Bahan Kuliah Magister Hukum Universitas Airlangga.
- Prianter Jaya Hairi, 2016, Kontradiksi Pengaturan Hukum yang Hidup di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Negara Hukum.
- Johan Wahyudi, 2012, Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan, Jurnal Perspektif, Volume XVII No. 2
- Yosi Andika Mulyadi, 2016, Kekuatan Pembuktian Akta Autentik Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Perkara pidana Tesis Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjag Mada, Yogyakarta.
- M. Ali Boedianto, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata.
- Syaibatul Hamdi, Suhaimi, 2013, and Mujibussalim, Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana, Jurnal Ilmu Hukum 1, Nomor 25–3.
- Inda Pongantung, 2016, Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Rahadi Wasi Bintoro, 2011, Penerapan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Di Peradilan Umum, Jurnal Dinamika Hukum 11. Nomor 2.
- Kamran.M, Maskun, 2021, Penipuan Dalam Jual Beli Online, Perspektif Hukum Telematika, Balobe Law Jurnal, Vol. 1 No.1, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Widya Yuridika, Andi Dala Ulang, Abdul Maasba Magassing, lin Karita Sakharina, Pemanfaatan Cyber Notary Terhadap Digitalisasi Akta, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 6, No.3, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Catatan Resmi Kenegaraan

Dokumen Elektronik telah diakui oleh Mahkamah Agung ke dalam Surat Edaran MA No.14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali dan kemudian diubah dengan SEMA MA No. 1 Tahun 2014.

Putusan Nomor 2392 K/PID.SUS/2018.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris